

**ANALISA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM MUSRENBANG-DES
TAHUN 2017 DI GAMPONG PANGGONG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

Fadhil Ilhamsyah¹, Jumba Parningotan Purba²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹email: ilhamsyah355@gmail.com

²email: jumpasidadolog@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the implementation of participatory development and to know the factors that affect public participation Gampong Panggong subdistrict of West Aceh Regency Hero Johan. Methods used in this research is descriptive qualitative method where data is taken from interviews, field notes, documents, memos and other documents to get the proper interpretation. The results showed that overall the participatory development implemetasi in Gampong Panggong subdistrict of Aceh Heroes Baratmasih Johan less good, in this case only a part of the community that are involved in the planning development. This is due to social and economic factors which the community at large as a fisherman so just focus on the fulfillment of survival. In addition the implementation of planning construction of Gampong Panggong subdistrict of West Aceh Regency Hero Johan. ditemukannya multiple factors that affect the level of public participation in the planning of development in Gampong Panggong is the factor endowments include presence awareness, public participation, and support from the Government and society. While restricting factors include poor quality of education, low income levels, limited employment and diperdesaan.

Keywords: *Implemetasi, Participatory development*

PENDAHULUAN

Di dalam bernegara ataupun berbangsa yang menjadi persoalan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah adalah bagaimana atau menciptakan sistem pemerintahan yang dapat mengemban fungsinya yaitu, untuk mensejahterakan masyarakat secara merata ataupun adil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah harus melakukan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan partisipatif selain melihat kinerja pemerintah, dapat juga membawa kemajuan bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman.

Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Disamping itu diharapkan pula masyarakat dapat menempati prioritas sebagai penikmat hasil pembangunan. Namun untuk mencapai keadaan itu kemandirian masyarakat tidaklah cukup melainkan diperlukan partisipasi aktif semua element yang ada termasuk kerjasama Pemerintah dengan *stake holder* yang ada.

Dimana pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentu dalam tahap pembangunan yang paling diutamakan dalam ini adalah tahap perencanaan karena perencanaan merupakan suatu hal sebagai tolak ukur di dalam menilai hasil dari pembangunan di suatu negara maupun di suatu daerah. Sehingga dalam proses perencanaan pembangunan tentu pemerintah perlu melibatkan partisipatif masyarakat dalam melakukan pembangunan. Dengan kata lain, Partisipasi masyarakat merupakan sebuah kata kunci agar pembangunan bisa sukses (Arif, 2006: h. 149).

Tentu dalam proses perencanaan partisipatif maka perlu diadakan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Penyelenggaraan Musrebang wajib diselenggarakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “ Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya (Musrebang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk meyepakati rencana kegiatan di Desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Mengingat hal tersebut maka pemerintah Aceh Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Gampong pasal 1 angka 8 yang berbunyi: “ Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Tuha Peut Gampong dan dihadiri oleh Pemerintah Gampong, lembaga-lembaga adat, para pemimpin agama di tingkat Gampong dan masyarakat.

Merujuk pada hal tersebut maka setiap pemerintah desa harus melakukan adanya Musrebangdes sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja yang akan dilakukan. Demikian halnya Pemerintah Gampong pangong di dalam menyusun rencana kerja juga melakukan adanya Musrebangdes sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam keputusan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sementara dalam realitanya yang didapatkan penulis dalam observasi awal masyarakat Gampong pangong belum semua anggota masyarakat terlibat dalam proses perencanaan yang dimana masyarakat masih bersifat pasif. Sifat masyarakat dalam menghadiri Musrebangdes yang masih di bawah rata-rata disebabkan dengan berbagai macam alasan yang terjadi. Hal ini di dasari karena kondisi sosial ekonomi masyarakat Gampong Pangong. Selain hal tersebut belum ada pemberitaan secara rinci dari pemerintah gampong mengenai proses perencanaan pembangunan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang penerapan pembangunan partisipatif di Gampong Pangong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun

2017 dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat tingkat pembangunan Partisipatif Masyarakat di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Tahun 2017.

Konsep Implementasi

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam buku (Agustino, 2006: h.124) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006: h.124). Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut
2. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.
4. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2006: h.128): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.
5. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Pembangunan Partisipatif

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Tahapan perencanaan pembangunan menurut (Solihin, 2006: h.49)

1. Perumusan dan penentuan tujuan
2. Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia
3. Pemilihan rangkain tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat di

definiskan perencanaan pembangunan wilayah dan daerah sebagai berikut: suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat stakholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan

Adapun faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut (Sastropetra, 1988 : h.23) yaitu:

- a. Faktor Kesadaran Kemauan
Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
- b. Adanya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat, apalagi yang memulai adalah pemimpin mereka. Sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
- c. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah daerah. dalam hal ini pemerintah camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. Adanya dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan Desa serta berperan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut (Sastropetro, 1988: h.23) yaitu:

- a. Rendahnya Kualitas Pendidikan
Sarana pendidikan masyarakat di Desa cenderung rendah. Masyarakat di Desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penurus bangsa menjadi terputus. Dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan, rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka.
- b. Tingkat Pendapatan Yang Rendah
Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rendahnya simpanan, dan rendahnya investasi, dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkungan yang tidak berujung pangkal. Pada umumnya masyarakat hanya bergantung pada alam.
- c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan di Pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencarian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Bahkan berarti lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas peluang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, data sekunder yaitu data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pembangunan Pembangunan Partisipatif di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Proses implementasi merupakan suatu perwujudan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi. Menurut Van Meter Van Horn menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa bagian yang saling berkaitan yaitu standard an sasaran kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahap perencanaan pembangunan yang dilakukan kebijakan yang diterapkan adalah adanya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada proses implementasi pembangunan partisipatif sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Gampong.

Berdasarkan hasil penelitian dari informan terkhususnya aparat pemerintah Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

Pemerintah Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adanya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan adanya pelibatan masyarakat, tetapi di dalam ada beberapa hal penghambat dalam pelaksanaan pembangunan seperti kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Gampong Panggong.

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan tolak ukur dari pada pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Hasil daripada kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

2. Pedoman Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, adanya sebuah pedoman yang digunakan. Pedoman yang digunakan berlandaskan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Gampong. Selain peraturan tersebut ditambah lagi dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun pedoman ini masih disesuaikan oleh aparatur Gampong Panggong sesuai dengan kondisi Gampong Panggong. Sehingga dengan adanya standar maka setiap pembangunan yang dilakukan gampong akan menjadi tepat sasaran dan tujuan dari perencanaan pembangunan tersebut akan dapat dicapai.

3. Sasaran Perencanaan Pembangunan

Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sasaran perencanaan pembangunan yang ingin dicapai adalah pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah, tepat dan masyarakat gampong dapat menikmati hasil daripada pembangunan tersebut dan secara tidak langsung akan mendorong perekonomian masyarakat Gampong Panggong.

4. Sumber Daya

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan akan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dimana di dalam setiap pelaksanaan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan keahlian masing-masing pelaksana kebijakan.

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah sumber daya manusia. Kegagalan pembangunan disebabkan oleh manusianya yang tidak memiliki kompeten dibidangnya. Seperti tabel di bawah berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah Jiwa
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak Tamat SD	20	12	32
SD	230	142	372
SLTP	199	160	359
SMU/SLTA	121	151	272
Perguruan Tinggi	9	9	18
Jumlah Total	579	474	1053

Sumber: Profil Gampong Panggong

Berdasarkan hal tersebut, maka sumber daya manusia berada di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat masih tergolong rendah karena masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya tamatan SD/Sederajat sebanyak 372 jiwa dan, tamatan SLTP/Sederajat sebanyak 395 jiwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa SDM di Gampong Panggong tergolong rendah.

6. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial di Gampong Panggong sudah memadai karena semua hasil musyawarah pembangunan yang akan dilakukan akan menjadi APBG. Hal ini dibuktikan dengan APBG Panggong. Seperti hal sebagai berikut:

Tabel 2
APBG Panggong Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	989.406.700,00
2	PAG	42.300.000,00
3	Alokasi Dana Desa	751.505.000,00
4	Alokasi Dana Gampong	195.600.900,00
5	Belanja	961.659.250,00
6	Surplus/Defisit	27.747.450,00
7	Pembiayaan	42.300.000,00
8	Pembiayaan Netto	42.000.000,00
9	Silpa	14.552.550,00

Sumber: APBG Panggong Tahun 2017

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan dana Gampong Panggong sudah memadai untuk melaksanakan berbagai pembangunan.

7. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Para Pelaksana

Komunikasi sangat menentukan pencapaian dari pelaksanaan pembangunan partisipatif di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap pelaksanaan pengawasan pembangunan harus dikomunikasikan dengan baik, baik dari aparat pemerintah gampong kepada masyarakat maupun masyarakat kepada aparat gampong.

a. Alur Komunikasi Yang Dibangun

Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jalur komunikasi yang dibangun adanya komunikasi timbal balik. Dimana setiap musyawarah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adanya upaya aparat gampong untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gampong. selain hal tersebut aparat gampong terlebih dahulu membuat pengumuman di masjid dan adanya usaha aparat gampong untuk mengajak melalui surat undangan yang diberikan.

b. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sikap mereka akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

c. Keberlanjutan Aspirasi Masyarakat

Pemerintahan Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, jika melihat ke belakang, bahwa pola perencanaan yang ada selalu menerima semua aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan. Tetapi aspirasi tersebut terkadang keberlanjutannya tidak ada dan penyebab aspirasi tersebut tidak ada lanjutan warga tidak mengetahui, menurut penilaian wargapembangun yang dilakukan hanya mengulang yang sudah ada sehingga tidak ada kemajuan dan pembangunan yang dilakukan tidak merata sehingga seolah-olah terlihat adanya kepentingan

8. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut mendorong keberhasilan kebijak public. Lingkungan sosial, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah kegagalan kinerja pelaksanaan kebijakan.

a. Lingkungan Sosial Politik

Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kondisi sosial politik disini adanya kelompok-kelompok di dalam masyarakat akibat daripada pemilihan Bupati

tahun belakangan ditambah lagi kepercayaan masyarakat yang kurang terhadap setiap aparat pemerintah gampong dan masyarakat mudah untuk terprovokasi oleh suatu isu.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, mayoritas penduduknya masih banyak tergantung terhadap penghasilan sebagai nelayan sehingga warga masih banyak hidup tergolong penduduk miskin. Masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan kelangsungan hidup. Berakibat masyarakat sangat susah dalam membagi waktu untuk ikut berpartisipasi. Seperti tabel dibawah:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Gampong Panggong Berdasarkan KK Kemiskinan

No	Dusun	Jumlah KK Miskin
1	Selada	55
2	Tomat	51
3	Bayam	47
4	Kangkung	51
Total		204

Sumber: Profil Gampong Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 343 jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, jumlah KK yang tergolong miskin 204 KK. Maka jumlah kepala keluarga penduduk yang tergolong miskin sebanyak 60% dari keseluruhan jumlah KK yang berada di Gampong Panggong.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Di dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi peran serta masyarakat dalam kegiatan. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan aparat pemerintah.

Faktor Pendukung

Adanya faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

a. Faktor Kesadaran Kemauan

Faktor kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Peran dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan kewajiban bersama. Hal ini terjadi di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagian warga masih memiliki kesadaran namun masih banyak yang memiliki kesibukan untuk menyambung hidup. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kesadaran dan tingkat ekonomi masyarakat.

b. Adanya Partisipasi Masyarakat

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan Undang-Undang tersebut maka partisipasi masyarakat gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sangat diperlukan sehingga setiap aspirasi pembangunan bisa disampaikan.

c. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pembangunan partisipatif itu tidak hanya merupakan usaha daripada aparat pemerintah gampong ataupun masyarakat saja. Tetapi hal ini merupakan suatu kegiatan bersama yang mana hasilnya dapat memberikan suatu kesejahteraan bagi penduduk gampong. Sehingga dengan adanya partisipasi setiap masyarakat dan dukungan aparat gampong akan membuat setiap proses perencanaan pembangunan itu akan berhasil.

Faktor Penghambat

Adanya faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

a. Rendahnya Kualitas Pendidikan

Masalah pendidikan di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, masih tergolong rendah dimana masih banyaknya anaka-anak yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah menyebabkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif masih kurang.

b. Tingkat Pendapatan Yang Rendah

Bahwa partisipasi masyarakat gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kurang baik disebabkan masyarakat kecenderungan apatis melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan makan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Gampong Panggong mayoritas masyarakat bergantung pada hasil daripada melaut. Selain hal tersebut masyarakat merasa pesimis dengan pembangunan partisipatif dan menganggap bahwa hal tersebut tidak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan gampong.

c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan Di Pedesaan

Pendidikan yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah sehingga usaha untuk mengembangkan ekonomi produktif tidak ada. Seperti yang terjadi di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dimana kegiatan usaha ekonomi produktif di gampong Panggong masih terbatas ragam dan jumlahnya. Sehingga masyarakat Gampong Panggong yang kebetulan berada di daerah pesisir di dalam menyambung hidup hanya bekerja sebagai nelayan.

SIMPULAN

Dari apa yang telah penulis kemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pembangunan partisipatif di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini karena belum sesuai dengan kebijana Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Gampong. demikian pula tujuan pedoman dengan proses pelaksanaan pedoman musyawarah kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan partisipatif, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, tidak adanya kesesuaian rencana kerja pembanguna gampong sesuai harapan masyarakat setempat.
2. Faktor-faktor yang menghambat implemementasi perencanaan Gampong Panggong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan sehingga pengetahuan masyarakat pembangunan partisipatif masih kurang. Selain hal tersebut masyarakat sudah pesimis disebabkan keputusan-keputusan pelaksanaan pembangunan tetap dari aparat pemerintah gampong karena keberlanjutan aspirasi dari masyarakat tidak ada.

REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Alfabeta.

Arif, syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, .Malang: Avarroes Pres.

Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunitasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.

Wahab, Solihin, A. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara.

Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006. *Menejemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 95 tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Gampong.